

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari bab III, penelitian ini menemukan bahwa *Seaspiracy* membingkai *overfishing* sebagai isu lingkungan global yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut sebagai kepentingan bersama masyarakat dunia. Melalui penonjolan berbagai kasus eksploitasi perikanan di berbagai wilayah, film ini menunjukkan bahwa permasalahan *overfishing* tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan yang terbatas pada negara atau kawasan tertentu. Sebaliknya, film *Seaspiracy* membangun pemahaman bahwa eksploitasi sumber daya laut merupakan bagian dari sistem yang saling terhubung melalui aktivitas ekonomi global, permintaan pasar internasional, dan keterlibatan berbagai aktor yang memanfaatkan sumber daya yang sama. Dengan demikian, kerusakan yang terjadi di suatu wilayah pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap wilayah lain karena sumber daya laut pada dasarnya merupakan sistem yang saling berkaitan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa framing *overfishing* sebagai isu global memiliki peran penting dalam memperluas perhatian publik terhadap urgensi permasalahan tersebut. Apabila *overfishing* hanya dipandang sebagai persoalan lokal, maka dampaknya cenderung dianggap sebagai tanggung jawab kelompok atau negara tertentu. Namun, ketika isu tersebut direpresentasikan sebagai ancaman

terhadap sumber daya bersama yang menopang kehidupan masyarakat dunia, maka muncul pemahaman bahwa perlindungan laut merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks ini, *Seaspiracy* tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana yang membangun kesadaran kritis mengenai hubungan antara aktivitas manusia, eksploitasi sumber daya laut, dan keberlanjutan lingkungan global.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa film dokumenter dapat berperan sebagai aktor non-negara yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu internasional. Melalui narasi, visual, dan pemilihan kasus yang ditampilkan, film mampu mengarahkan perhatian publik pada aspek-aspek tertentu dari realitas sehingga membentuk persepsi mengenai tingkat urgensi suatu permasalahan. Dalam kasus *Seaspiracy*, film berhasil mengangkat *overfishing* dari isu sektoral menjadi isu global yang relevan bagi masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa media dokumenter tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk cara publik memaknai dan merespons berbagai tantangan global.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa representasi *overfishing* dalam *Seaspiracy* menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep *Tragedy of The commons*. Sumber daya laut digambarkan sebagai sumber daya bersama yang dimanfaatkan oleh berbagai aktor untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Ketika sumber daya di suatu wilayah mengalami penurunan, aktivitas eksploitasi cenderung bergeser ke wilayah lain

yang masih memiliki stok ikan yang tersedia. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya laut tidak berhenti pada satu kawasan, tetapi terus meluas mengikuti kebutuhan pasar dan peluang ekonomi yang ada. Akibatnya, eksploitasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor secara rasional justru menghasilkan kerugian kolektif berupa menurunnya kualitas dan keberlanjutan sumber daya laut secara global.

Penulis melihat bahwa, penelitian ini menunjukkan permasalahan utama yang ditampilkan dalam *Seaspiracy* bukan hanya terletak pada tingginya aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga pada lemahnya kemampuan berbagai mekanisme pengelolaan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya bersama. Berbagai kasus yang ditampilkan dalam film memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tidak selalu diikuti oleh pengawasan dan implementasi yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan eksploitasi sumber daya laut terus berlangsung meskipun dampak negatifnya telah diketahui secara luas. Oleh karena itu, keberlanjutan sumber daya laut memerlukan pengelolaan yang mampu membatasi akses, mengendalikan intensitas pemanfaatan, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan menjaga keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.

#### **4.2. Saran**

*Seaspiracy* tidak hanya bersumber dari tingginya aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dari lemahnya pengelolaan sumber daya laut, ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya perikanan, serta tingginya tekanan pasar global yang

mendorong eksploitasi secara berlebihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya laut sebagai *common-pool resources* menghadapi ancaman serius ketika berbagai aktor berupaya memaksimalkan kepentingannya masing-masing tanpa diimbangi dengan mekanisme pengelolaan dan pembatasan akses yang efektif. Oleh karena itu, saran yang dihasilkan dari penelitian ini difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola sumber daya laut, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak *overfishing*, serta mendorong peran berbagai aktor dalam menciptakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan.

Saran pertama yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan *awareness* masyarakat terhadap dampak dan bahaya *overfishing* bagi keberlanjutan sumber daya laut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *overfishing* sering kali dipandang sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu tersebut masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dalam penyebaran informasi dan edukasi mengenai dampak eksploitasi sumber daya laut terhadap ekosistem, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat pesisir. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk film dokumenter, kampanye publik, institusi pendidikan, maupun platform digital, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa keberlanjutan sumber daya laut merupakan kepentingan bersama yang memerlukan perhatian kolektif.

Saran kedua adalah perlunya penguatan mekanisme *restriction of access* dalam pengelolaan sumber daya laut untuk mencegah terjadinya eksploitasi

berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya *overfishing* adalah terbukanya akses terhadap sumber daya laut tanpa diimbangi dengan pembatasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengendalikan intensitas pemanfaatan sumber daya perikanan melalui instrumen seperti pembatasan jumlah kapal yang beroperasi, kuota tangkapan, sistem perizinan yang lebih selektif, serta penetapan kawasan konservasi dan wilayah tangkap yang terkelola dengan baik. Penerapan pembatasan akses yang efektif diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap stok ikan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut dalam jangka panjang.

Saran ketiga adalah memperkuat implementasi *state-based resource management* melalui peningkatan kapasitas negara dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya laut. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk mencegah *overfishing* apabila tidak disertai dengan pengawasan dan penegakan yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat sistem monitoring, pengawasan aktivitas perikanan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Selain itu, kerja sama antarnegara juga perlu ditingkatkan mengingat karakteristik *overfishing* yang bersifat lintas batas. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada keberlanjutan sumber daya, negara dapat berperan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

